

# **Pendampingan Pokja Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Pengelolaan Program PPSP 2015**

Disampaikan oleh  
KETUA PIU TEKNIS PROGRAM PPSP  
Tanggal 11 Maret 2015





# OUTLINE

---

1. Hirarki Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) menurut Perpres No. 185/2014

---

2. Progres Pelaksanaan PPSP 2014

---

4. Kab/Kota Peserta PPSP 2015 dan Alokasi Fasilitator Sanitasi (PF dan CF)

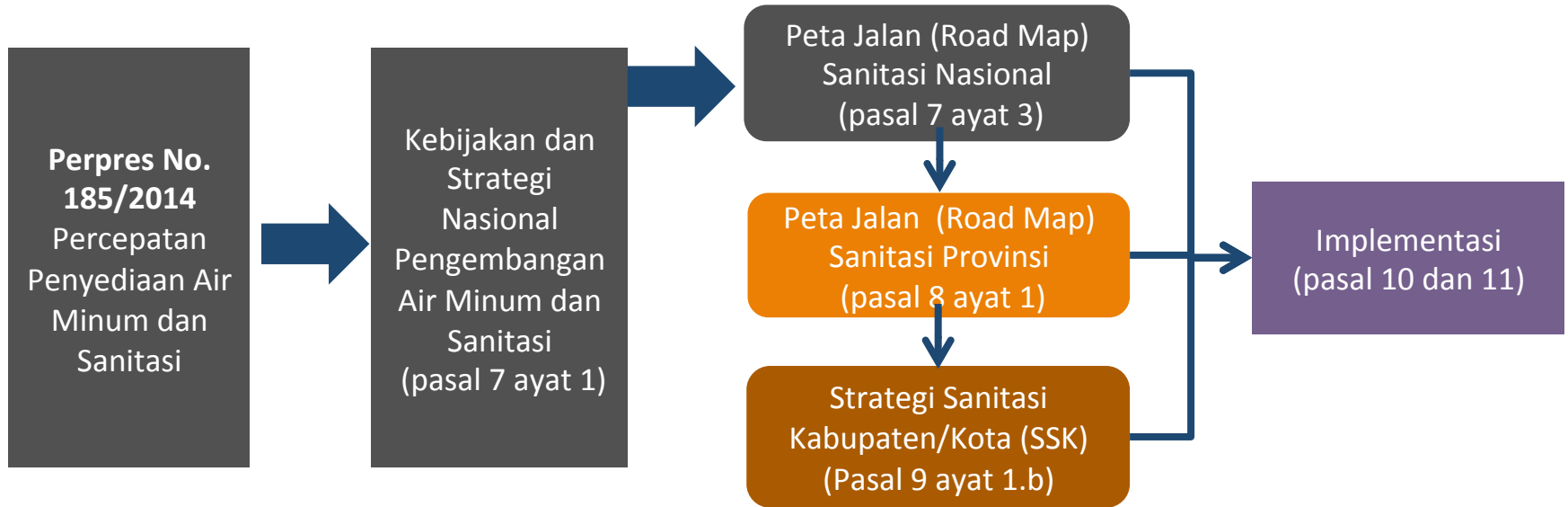
---

5. Gambaran Output PPSP 2015 tingkat Provinsi

---

6. Dukungan dari Kementerian PU PR dalam Pengelolaan PPSP 2015

# HIRARKI PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KAB/KOTA MENURUT PERPRES NO. 185/2014



## Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) (Pasal 9 ayat 1.b)

Kabupaten/Kota perlu memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang disebut sebagai Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

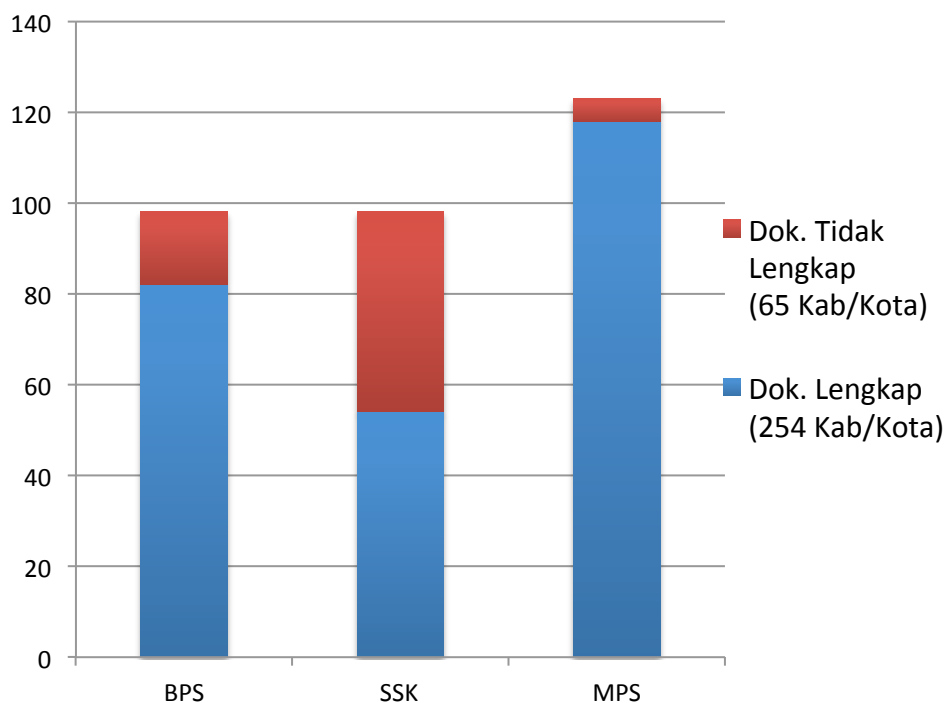
SSK disusun oleh Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) Kabupaten/Kota atau Pokja dengan nama lain

Pokja Sanitasi Provinsi melaksanakan tugas dalam lingkup Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur → Advokasi, Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi

# PROGRES PELAKSANAAN PPSP 2014

## Progres PPSP 2014

Kab/Kota



	BPS	SSK	MPS
<b>Dok Lengkap</b>	82	54	118
<b>Dok Tidak Lengkap</b>	16	44	5
<b>Total</b>	98	98	123

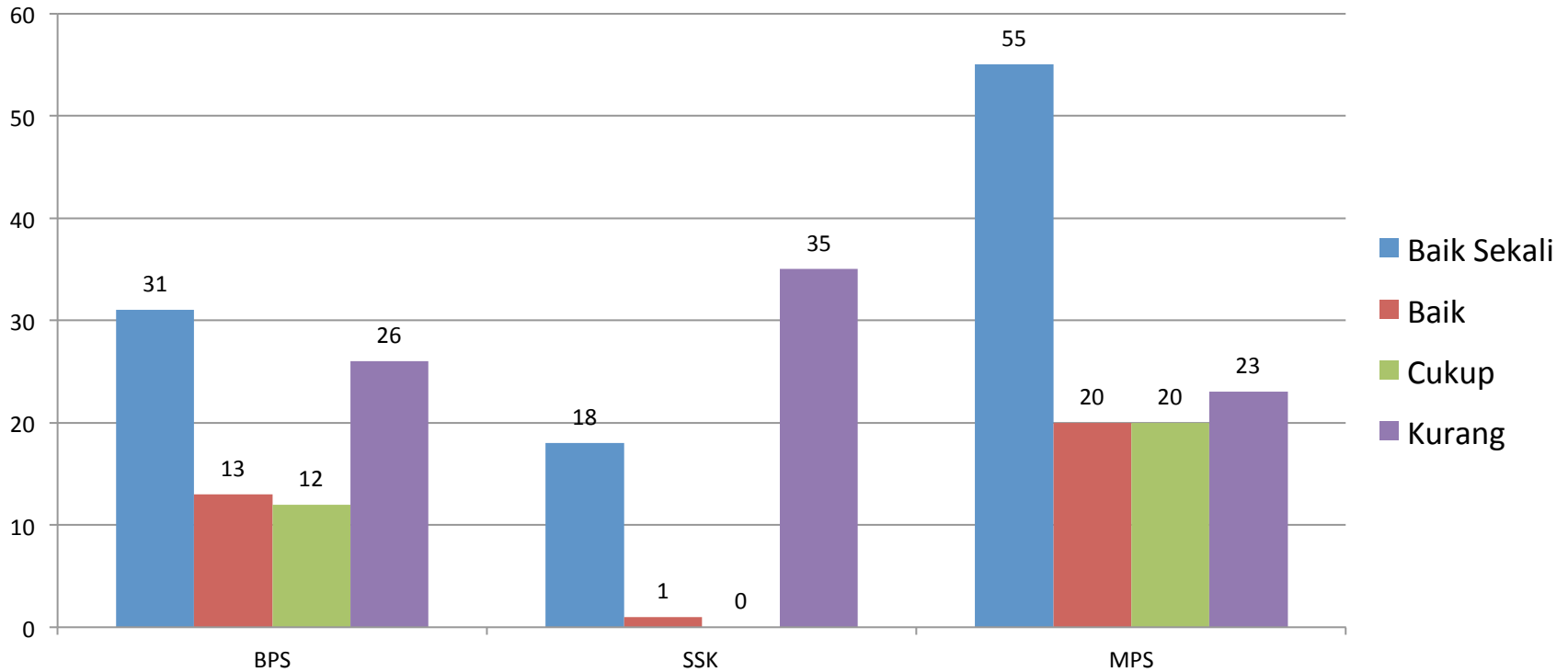
### Dokumen PPSP 2014 Belum Selesai

Provinsi	BPS	SSK	MPS
Provinsi Sumatera Utara	2	9	
Provinsi Riau	2	4	1
Provinsi Bengkulu	1	1	
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			1
Provinsi Kepulauan Riau		2	2
Provinsi Banten	1	2	
Provinsi Jawa Barat	1	1	1
Provinsi Kalimantan Tengah		3	
Provinsi Sulawesi Utara		4	
Provinsi Sulawesi Tenggara	2	3	
Provinsi Sulawesi Tengah		1	
Provinsi Gorontalo		1	
Provinsi Maluku		4	
Provinsi Maluku Utara	3	3	
Provinsi Papua	1	3	
Provinsi Papua Barat	3	3	

# PROGRES PELAKSANAAN PPSP 2014

Kab/Kota

## Kualitas Dokumen PPSP 2014



Penilaian Kualitas Dokumen didasarkan pada hasil QA Provinsi, dengan kriteria:

90-100 : Baik Sekali

80-90 : Baik

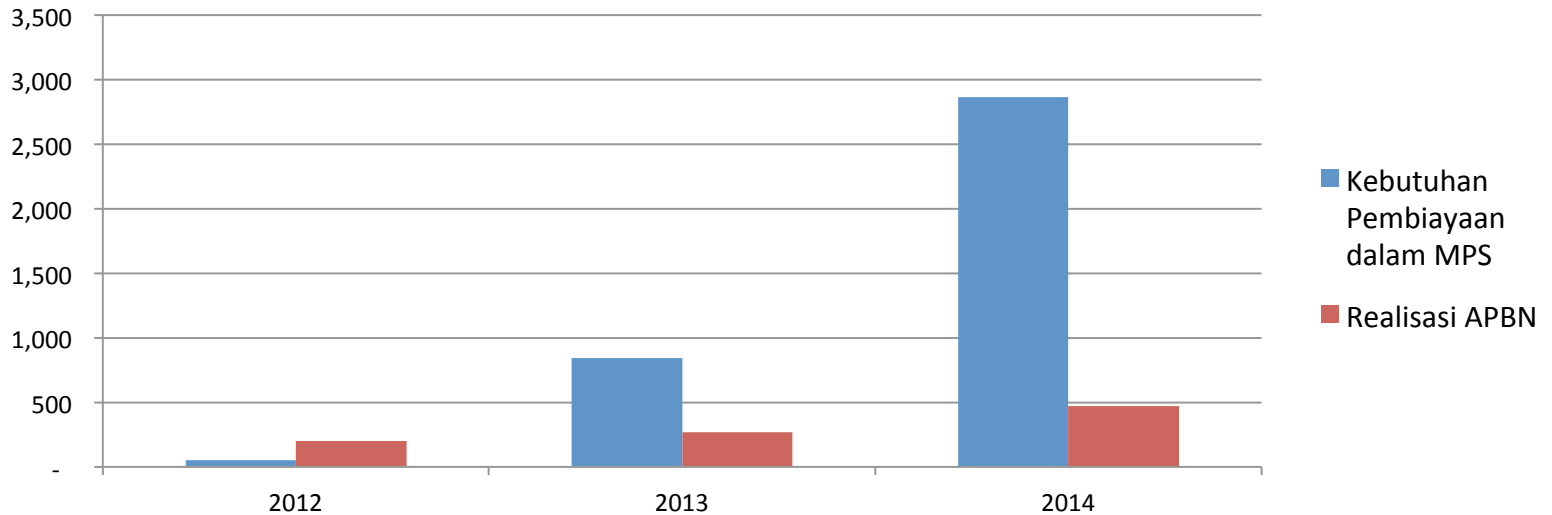
65-80 : Cukup

<65 : Kurang

# IMPLEMENTASI PROGRAM PPSP 2014

## Kebutuhan Pembiayaan Sanitasi Dok. MPS

Rp. (dalam miliar)



Biaya (Milliar Rp)	2012	2013	2014
Kebutuhan Pembiayaan dalam MPS *)	49	846	2865
Realisasi APBN	199	270	473

Rendahnya realisasi APBN disebabkan antara lain oleh:

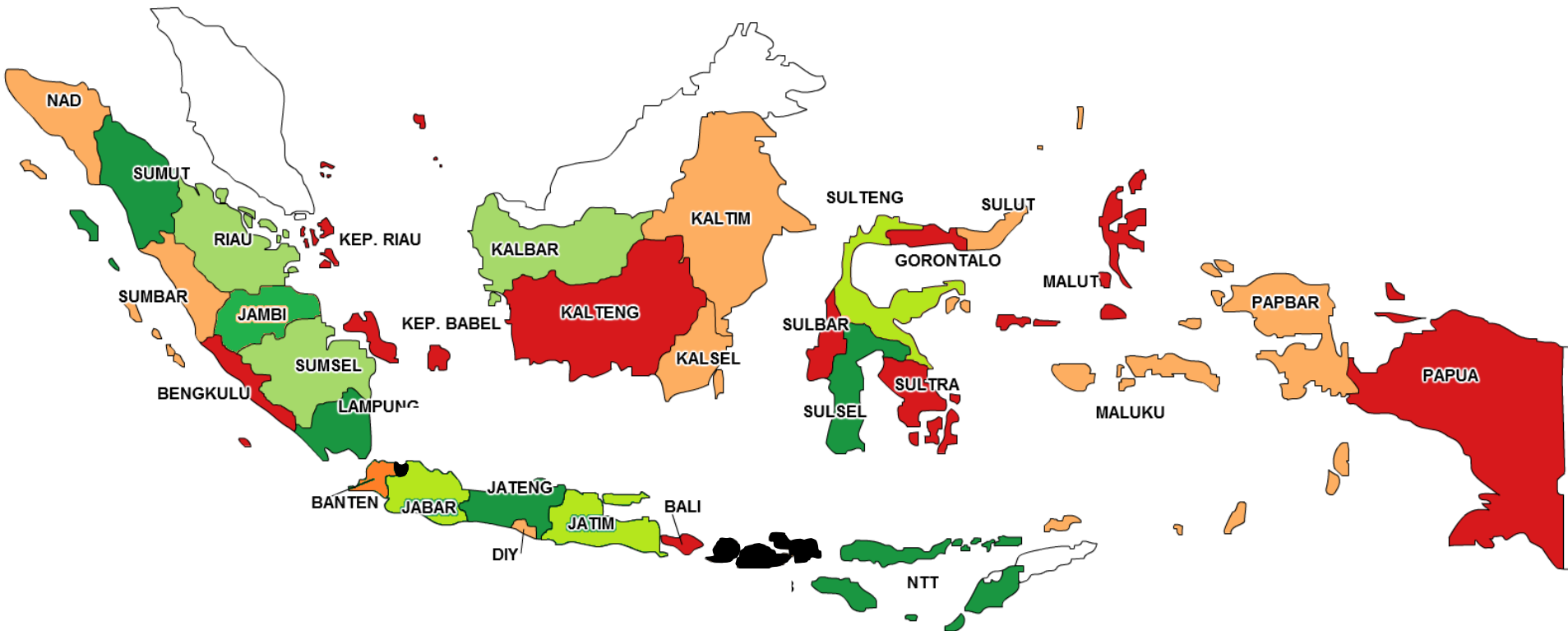
1. Belum terpenuhinya Readiness Criteria
2. Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam lingkup kegiatan yang dapat dibiayai oleh APBN

\*) Kebutuhan pembiayaan didasarkan pada data Dokumen MPS 206 Kab/Kota dari total 509 Kab/Kota



# KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015

219 Kab/Kota → 32 Provinsi		
Penyusunan MPS 98 Kab/Kota	Penyusunan BPS-SSK 21 Kab/Kota	Updating SSK 100 Kab/Kota



# KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015

No	Provinsi	Kabupaten Kota				PF	CF
		MPS	BPS-SSK	Update SSK	Jumlah		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	9	9	2	9
2	Sumatera Utara	13	1	1	15	3	15
3	Sumatera Barat	1	0	9	10	2	10
4	Riau	5	4	0	9	2	9
5	Jambi	1	0	0	1	1	1
6	Sumatera Selatan	2	1	6	9	2	9
7	Bengkulu	2	0	2	4	2	4
8	Lampung	4	1	2	7	2	7
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	0	0	1	1	1
10	Kepulauan Riau	4	0	0	4	2	4
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	1	0	9	10	2	10



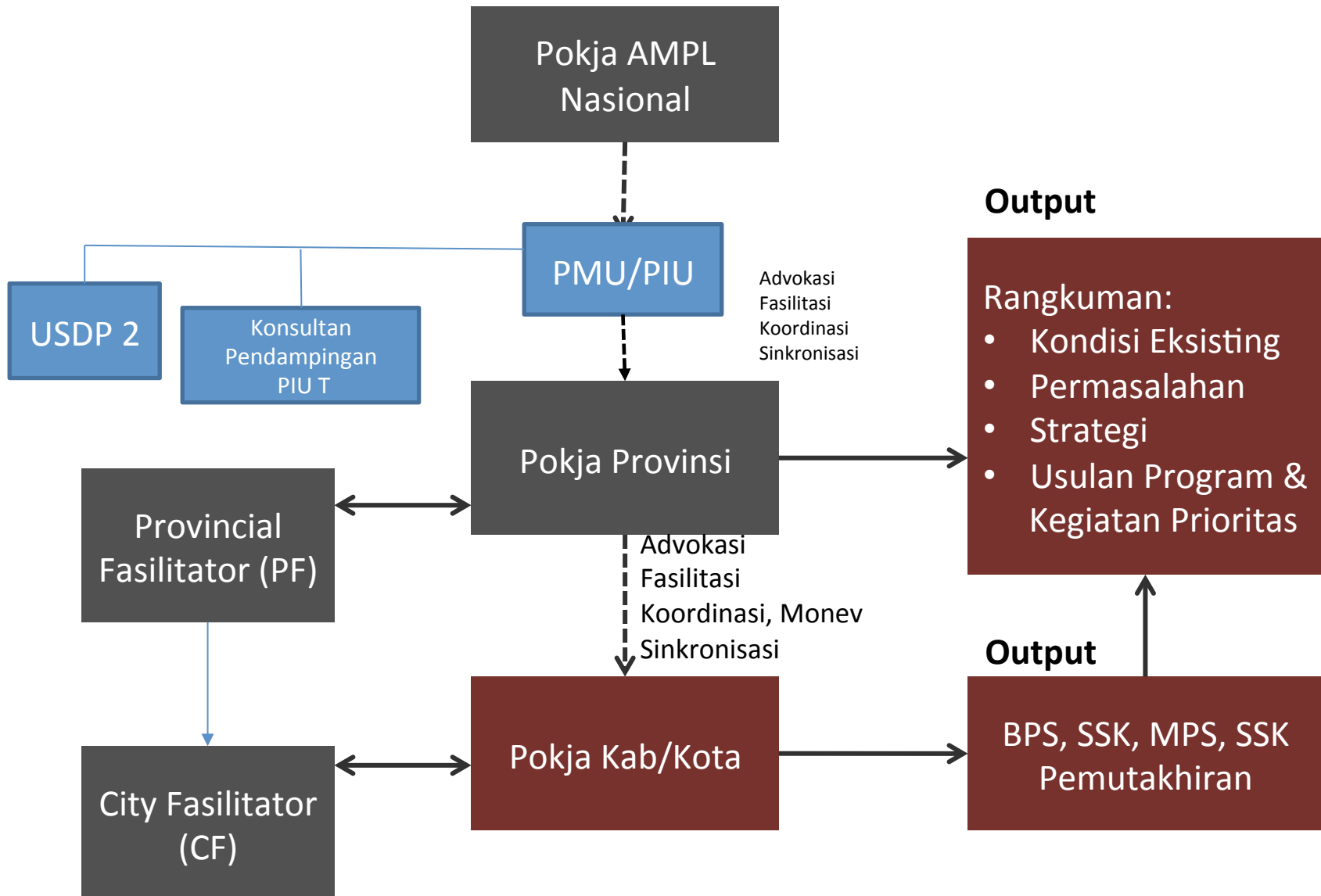
# KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015

No	Provinsi	Kabupaten Kota				PF	CF
		MPS	BPS-SSK	Update SSK	Jumlah		
13	Jawa Tengah	0	0	19	19	3	19
14	D I Yogyakarta	0	0	5	5	2	5
15	Jawa Timur	0	0	11	11	2	11
16	Banten	2	0	3	5	1	5
17	Bali	0	0	4	4	1	4
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	5	5	0	10	2	10
20	Kalimantan Barat	0	0	4	4	2	4
21	Kalimantan Tengah	7	3	0	10	3	10
22	Kalimantan Selatan	0	0	4	4	1	4
23	Kalimantan Timur	1	1	4	6	2	6
24	Kalimantan Utara	0	0	1	1	1	1

# KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015

No	Provinsi	Kabupaten Kota				PF	CF
		MPS	BPS-SSK	Update SSK	Jumlah		
25	Sulawesi Utara	4	0	0	4	1	4
26	Sulawesi Tengah	11	1	0	12	3	12
27	Sulawesi Selatan	7	0	4	11	3	11
28	Sulawesi Tenggara	7	1	2	10	3	10
29	Gorontalo	2	0	0	2	1	2
30	Sulawesi Barat	0	0	1	1	1	1
31	Maluku	8	0	0	8	2	8
32	Maluku Utara	4	0	0	4	2	4
33	Papua Barat	3	2	0	5	2	5
34	Papua	3	1	0	4	2	4
JUMLAH		98	21	100	219	61	219

# RINGKASAN POLA PENDAMPINGAN KEGIATAN PPSP





# LINGKUP KEGIATAN PENDAMPINGAN PPSP OLEH POKJA PROVINSI

1. Memberikan advokasi pentingnya sanitasi dan program PPSP kepada Bupati/Walikota dan pihak terkait sanitasi di Kab/Kota
2. Fasilitasi pelatihan EHRA kepada Pokja Kab/Kota
3. Penilaian (Quality Assurance) terhadap dokumen yang disusun Pokja Kab/Kota
4. Koordinasi/pembahasan progres dan permasalahan PPSP secara berkala
5. Monev progres PPSP melalui Nawasis
6. Sinkronisasi usulan-usulan program/kegiatan sanitasi dari Pokja Kota/Kab dan memfasilitasi pemrosesan usulan Kab/Kota yang didanai APBD Prov dan APBN







# DUKUNGAN KEMEN. PU-PR DALAM PPSP 2015

---

1. Penyediaan Pedoman PPSP

---

2. Penyediaan Tenaga Pendamping (PF&CF)

PF : 1-3 orang per Provinsi

CF : 1 orang per Kab/Kota

---

3. Pelatihan Tenaga Pendamping (PF&CF) untuk Penyusunan Dokumen BPS,SSK, MPS, SSK Pemutakhiran

---

4. Pelatihan Penyusunan Dokumen BPS,SSK,MPS, SSK Pemutakhiran bagi Pokja Provinsi dan Pokja Kab/Kota

---

5. Kontribusi sebagian biaya untuk Penjaminan Kualitas Dokumen BPS,SSK,MPS, Pemutakhiran SSK

---

6. Workshop Nasional Progres dan Finalisasi Dokumen SSK

---

7. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi yang Memenuhi Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) dan Fasilitasi Kegiatan Non Konstruksi (Jambore Sanitasi, Fasilitasi Perda Sanitasi, Bantuan Teknis)

---

8. Pendampingan Pengelolaan PPSP secara Nasional



**TERIMA KASIH**

---